

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan yang dilakukan seseorang dengan waktu yang singkat, jadwal yang terencana, dan tujuan ke suatu tempat dengan motif tertentu, meskipun bukan untuk mencari pekerjaan atau kesempatan hidup di daerah tersebut. Pariwisata adalah hasil dari pergerakan manusia untuk mencari sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi tempat yang baru, mencari suasana baru, dan melakukan perjalanan untuk melepaskan diri dari rutinitas aktivitas. Saat ini, pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor utama yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan internasional sebuah negara. Perekonomian, sosial, dan budaya daerah tujuan wisata dapat ditingkatkan melalui pariwisata, sebuah bisnis yang sangat menjanjikan dan primadona "komoditas ekspor" (Pitana dan Gayatri 2005:40).

Pariwisata saat ini terus mengalami perkembangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari jumlah wisatawan, tetapi juga dari jenis dan bentuk pariwisata yang ditawarkan. Industri pariwisata telah menjadi sektor terbesar yang berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara dan menguatkan perekonomian suatu wilayah. Dalam konteks ini, pariwisata dapat dianggap sebagai katalisator untuk pendapatan negara.

Sumatera Barat memiliki beragam destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alamnya, mulai dari keunikan kontur lanskap hingga kearifan lokal dan keramahan penduduk setempat. Faktor-faktor ini membuat wisatawan merasa

nyaman dan aman selama berkunjung. Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat merupakan strategi yang sangat efektif untuk memberdayakan sumber daya manusia di tingkat lokal dan memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat setempat.

Pariwisata berbasis masyarakat telah menjadi tren yang signifikan dalam pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Salah satu manifestasi dari pendekatan ini adalah konsep desa wisata, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan warisan budaya. Dalam konteks ini, Desa Wisata Pariangan di Sumatera Barat muncul sebagai contoh yang menarik, mengingat keunikan budaya Minangkabau yang kental serta peran sentral pemangku adat dalam struktur sosialnya.

Desa Wisata Pariangan, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, merupakan salah satu contoh desa wisata yang memadukan keindahan alam dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Desa Wisata Pariangan dikenal sebagai salah satu desa tertua di Minangkabau dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang tinggi. Keberadaan rumah adat, kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan tradisi Minangkabau, serta keindahan alam yang memikat menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata yang potensial. Namun, pengembangan pariwisata di desa ini tidak bisa dilepaskan dari peran pemangku adat, yang menjadi penjaga nilai-nilai budaya dan tradisi. Pengembangan desa wisata ini tidak terlepas dari peran penting pemangku adat dalam melestarikan dan mempromosikan budaya tradisional sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Menurut Oka A. Yoeti (2006: 1-2), pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya berlandaskan konsep pariwisata budaya (*cultural tourism*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990. Pendekatan ini didasari oleh keberagaman seni dan budaya yang menjadi kekayaan Indonesia di setiap destinasi wisata. Oleh karena itu, setiap upaya pengembangan pariwisata seharusnya memperhatikan pelestarian seni dan budaya bangsa. Selain itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan di lapangan memiliki kewajiban moral untuk memanfaatkan potensi seni dan budaya dalam setiap aspek pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, pembuatan cendera mata, promosi, hingga pengolahan serta penyajian makanan dan minuman.

Pemangku adat merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam menjaga, mengelola dan memimpin berbagai aspek kehidupan adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat, norma-norma sosial, dan nilai-nilai budaya tradisional yang turun temurun diwariskan ke generasi berikutnya.

Pemangku adat tidak hanya bertugas dalam urusan adat, tetapi juga dalam menyelesaikan konflik, memberikan nasihat, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Mereka sering kali dianggap sebagai pemimpin spiritual dan pemegang kearifan lokal yang dihormati oleh masyarakat (Arrazak, 2022).

Pemangku adat di Desa Pariangan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi masyarakat setempat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata sangat krusial, karena mereka memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal, dan tidak mengorbankan keaslian serta integritas tradisi yang ada di desa. Dengan demikian, pemangku adat memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan pariwisata dan pelestarian warisan budaya.

Para pemangku adat di Nagari Pariangan memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor pariwisata, dengan tujuan untuk memperkenalkan Pariangan tidak hanya sebagai destinasi wisata alam yang indah, tetapi juga sebagai tempat yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Mereka berupaya mempromosikan Pariangan sebagai desa yang memiliki nilai sejarah dan tradisi yang tinggi, yang bisa menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Keterlibatan pemangku adat ini terlihat dalam berbagai inisiatif, seperti mengadakan festival budaya, pelestarian seni tradisional, dan memberikan pemahaman tentang filosofi hidup masyarakat Minangkabau kepada wisatawan. Dengan memperkenalkan budaya lokal melalui berbagai kegiatan wisata, pemangku adat berupaya menjaga kelestarian adat istiadat sambil mendorong perkembangan ekonomi desa melalui pariwisata yang berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga memastikan bahwa pembangunan pariwisata yang dilakukan tidak merusak nilai-nilai tradisional yang ada. Para pemangku adat sering terlibat dalam proses perencanaan wisata, seperti pengaturan lokasi wisata, penyusunan regulasi yang terkait dengan budaya, dan penyampaian informasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menghormati adat serta norma lokal. Sebagai penjaga budaya, mereka berupaya menjaga agar setiap aspek pembangunan pariwisata di Pariangan tetap menghormati kearifan lokal dan tetap mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki.

Pemangku adat di Desa Wisata Pariangan memegang peranan kunci dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam menjalankan berbagai upacara dan tradisi, tetapi juga dalam menjaga norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Peranan ini menjadi semakin penting dalam konteks pengembangan pariwisata, di mana keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi harus dijaga. Pemangku adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program pariwisata.

Peranan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Pariangan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program-program pariwisata berbasis komunitas. Pemangku adat berperan dalam menetapkan aturan-aturan yang mengatur interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak lingkungan alam maupun sosial budaya. Selain itu, mereka juga

berperan dalam mempromosikan desa wisata melalui berbagai media, baik lokal maupun internasional.

Selain itu, keterlibatan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata dapat meningkatkan autentisitas pengalaman wisatawan. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan tradisi lokal. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendorong mereka untuk berkunjung kembali atau merekomendasikan desa wisata ini kepada orang lain. Dengan demikian, keterlibatan pemangku adat tidak hanya berdampak pada pelestarian budaya, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Peranan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata menjadi penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana kebudayaan dan tradisi lokal dapat beradaptasi dengan perubahan global. Hal ini dapat menjadikan pemangku adat mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi arus pariwisata, serta bagaimana mereka memanfaatkan pariwisata sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan melestarikan warisan budaya.

Sejalan dengan pentingnya peran pemangku adat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perkembangan pariwisata, keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya juga menjadi elemen krusial dalam pengembangan destinasi wisata. Hal ini terlihat di Peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dapat dibagi menjadi lima kategori utama. Sebagai *policy creator* yang merancang kebijakan

strategis seperti penetapan regulasi untuk menunjang desa wisata. Sebagai koordinator yang berfungsi mengkoordinasikan kebutuhan antar pemangku kepentingan, termasuk melalui musrenbang. Sebagai fasilitator, mereka menyediakan infrastruktur, pelatihan, dan pengelolaan administrasi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Sebagai implementor, POKDARWIS bertanggung jawab dalam pengelolaan langsung desa wisata, sementara DISBUDPAR mengawasi pelaksanaannya. Sebagai akselerator, POKDARWIS, Unnes, masyarakat, dan wisatawan memainkan peran mempercepat tujuan melalui kolaborasi, edukasi, inovasi, hingga promosi digital. Namun, kolaborasi ini sering kali terganjal kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi yang belum optimal, dan ketiadaan kemitraan dengan sektor swasta (Nugroho, dkk. 2020).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat penting dan terbagi ke dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahap tersebut, mulai dari merencanakan program-program pembangunan pariwisata, terlibat dalam pelaksanaan event budaya, hingga menjaga kelestarian kawasan pariwisata. Pada tahap evaluasi, masyarakat juga berperan dalam membuat peraturan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan kawasan pariwisata, seperti melarang hewan ternak masuk dan mengingatkan wisatawan untuk berpakaian sopan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan keberhasilan pengembangan pariwisata, tetapi juga menjaga budaya dan lingkungan lokal (Prasetyo, 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Pariangan?
2. Apa kendala yang dihadapi pemangku adat dalam menjalankan perannya terhadap pengembangan pariwisata di desa wisata Pariangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Pariangan
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemangku adat dalam menjalankan perannya terhadap pengembangan pariwisata di desa wisata Pariangan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Selain menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga memiliki manfaat akademis yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga dapat menjadi referensi bagi pembaca tentang bagaimana peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di Nagari Pariangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu diharapkan kepada pembaca untuk mengetahui serta memahami peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di Nagari Pariangan.

pengembangan pariwisata, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti dapat lebih mudah memperkuat tema penelitian karena banyak artikel yang berkaitan dengan rancangan penelitian ini dipublikasikan. Ini adalah ulasan dari beberapa jurnal yang peneliti muat.

Pertama, artikel ditulis oleh Alesandro Pendong, dkk. Tahun 2020 yang berjudul “Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan” yang dipublikasikan pada Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol.2. Jurnal ini membahas peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Gunung Payung di Desa Poopo, Kabupaten Minahasa Selatan. Pemerintah Desa dan masyarakat telah melakukan upaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dengan memperagakan tari-tarian budaya dan menyediakan alat transportasi. Namun, peran pemerintah masih belum maksimal dalam pengembangan objek wisata tersebut. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten untuk mengembangkan objek wisata Gunung Payung dengan lebih baik.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Poopo dalam mengembangkan pariwisata Gunung Payung. Meskipun telah ada langkah-langkah seperti menampilkan tari-tarian budaya dan menyediakan transportasi, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Saran yang diberikan mencakup

peningkatan daya tarik budaya, kualitas transportasi, kerjasama dengan pihak terkait, dan peningkatan fasilitas.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Alesandro,dkk ini persamaannya terletak pada tema pengembangan pariwisatanya, sedangkan perbedaannya jurnal yang ditulis oleh Alesandro lebih berfokus kepada bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, sementara peneliti berfokus bagaimana cara pemangku adat dalam mengembangkan pariwisata.

Kedua, artikel dengan judul “Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang” yang ditulis oleh Annatasya Yunita Nungroho, dkk. Diterbitkan di *Jurnal of Public Policy and Management Review*, Vol.11 pada tahun 2022. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan Desa Wisata Nongkosawit di Semarang, dengan fokus pada peran berbagai stakeholders dalam proses tersebut. Stakeholders yang terlibat mencakup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, POKDARWIS Kandang Gunung, Universitas Negeri Semarang, serta masyarakat lokal. Masing-masing pihak memiliki peran penting, seperti pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator, yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pengembangan desa wisata. Namun, meskipun ada upaya kolaboratif, hubungan antara *stakeholders* masih perlu ditingkatkan, terutama dalam melibatkan masyarakat dan pihak swasta.

Kesimpulannya, pengembangan Desa Wisata Nongkosawit memerlukan kolaborasi yang lebih baik antara stakeholders untuk mengatasi tantangan yang

ada. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi melalui kelompok sadar wisata sangat penting untuk menciptakan sinergi yang efektif. Dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama, diharapkan pengembangan desa wisata ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annatasya, dkk persamaannya terletak pada temanya yaitu pengembangan pariwisata, sedangkan untuk perbedaannya penulis lebih berfokus kepada pemangku adat sedangkan Annatasya, dkk berfokus kepada stakeholders yang meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, POKDARWIS Kandang Gunung, Universitas Negeri Semarang, serta masyarakat lokal

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ni Putu Paristah, dkk. Tahun 2022 yang berjudul “Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar” dipublikasikan pada JUMPA Vol.8, No. 2. Studi mengenai peranan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata pada Desa Wisata Kerta menjadi penting dalam konteks Antropologi Sosial, karena memberikan wawasan tentang bagaimana kebudayaan dan tradisi lokal dapat beradaptasi dengan perubahan global. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemangku adat mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi arus pariwisata, serta bagaimana mereka memanfaatkan pariwisata sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan melestarikan warisan budaya. Artikel ini membahas peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Kerta di Kecamatan Payangan, Gianyar, Indonesia.

Penulis, mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, bisnis, dan media untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan meningkatkan kondisi ekonomi lokal. Melalui metode kualitatif, termasuk analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam, penelitian ini menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dan mengusulkan model kolaboratif untuk pengembangan pariwisata.

Artikel ini menekankan perlunya koordinasi dan integrasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan potensi pariwisata desa. Penulis menyarankan agar pemerintah membangun kemitraan yang lebih kuat dengan sektor swasta dan media, serta mendukung peran kelompok masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dengan fokus pada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, diharapkan pengembangan Desa Wisata Kerta dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian Ni Putu Paristah, dkk persamaannya terletak pada tema yang diangkat, sedangkan perbedaannya terletak pada *stakeholders* yang menjadi informan utamanya.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Dimas Alji Prasetyo, dkk. Tahun 2023 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat” yang dipublikasikan pada Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol.6 No.1. Artikel ini membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, dengan fokus pada keterlibatan

masyarakat lokal dalam empat tahap penting: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, terutama niniak mamak, memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan budaya, seperti bakau adat dan festival matrilineal, yang tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya juga terlihat dalam upaya mereka menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan perkampungan. Pada tahap evaluasi, masyarakat berperan aktif dalam membuat peraturan nagari untuk mengatur kegiatan pariwisata, termasuk menertibkan kendaraan dan mengingatkan wisatawan untuk berpakaian sopan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan lingkungan. Keterlibatan ini menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengalaman pariwisata yang autentik dan berkelanjutan.

Meskipun artikel ini memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya, penulis mengakui bahwa dampak jangka panjang dari partisipasi ini terhadap eksistensi budaya lokal belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberlangsungan budaya di Nagari Sijunjung. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti peran vital masyarakat dalam menjaga

dan mempromosikan warisan budaya mereka, serta dampak positif dari pariwisata terhadap ekonomi lokal.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dimas, dkk persamaannya terletak pada tema yang diangkat yaitu pengembangan pariwisata, sedangkan perbedaannya terletak pada partisipasi dan peran yang dikaji.

F. Kerangka Konseptual

Menurut Yoeti (1982: 109-111) pariwisata dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sementara untuk suatu tujuan menikmati perjalanan untuk tamasya dan hiburan atau untuk memenuhi keinginan yang berbeda dan dipenuhi dari satu tempat ke tempat lain. Tergantung dari potensi daerah atau warisan peninggalan nenek moyang negara, timbulah hal tersebut jenis wisata dan jenis wisata berkembang menjadi kegiatan yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Yoeti (1993), pengembangan pariwisata mencakup tiga aspek utama: 1) Pembinaan Masyarakat Pariwisata. Salah satu hal yang krusial dalam pengembangan pariwisata adalah pembinaan masyarakat pariwisata, karena hambatan dalam pengembangan sering kali muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan: secara formal, seperti pendidikan pariwisata, dan secara informal, seperti penyelenggaraan kursus- kursus yang berkaitan dengan bidang pariwisata. 2) Pembinaan Produk Pariwisata. Pengembangan produk pariwisata harus dilakukan secara teratur dan efektif untuk meningkatkan kualitas serta layanan dari berbagai produk wisata. Pembinaan ini bisa mencakup berbagai upaya, seperti pendidikan dan

penyediaan fasilitas, pengaturan dan pengarahan, serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas produk pariwisata. 3) Pemasaran yang Terpadu. Salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah pemasaran yang terpadu, yang memastikan bahwa semua elemen dalam pariwisata bekerja secara sinergis untuk menarik pengunjung (dalam Silalahi & Sunarta, 2018).

Menurut Yoeti (2006: 1-2), pengembangan pariwisata di Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pariwisata budaya (*cultural tourism*) seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1990. Konsep pariwisata budaya ini muncul dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki potensi seni dan budaya yang beragam yang tersebar di setiap destinasi wisata. Oleh sebab itu, wajar jika setiap langkah dalam pengembangan pariwisata diharapkan selalu memperhatikan terpeliharanya seni dan budaya bangsa, dan menjadi tanggung jawab moral bagi mereka yang mengambil kebijakan di lapangan untuk selalu menggunakan potensi seni dan budaya dalam setiap kegiatan pengembangan, mulai dari pembangunan infrastruktur, cendera mata, bahan-bahan promosi, makanan dan minuman, termasuk penyajiannya.

Konsep pengembangan desa wisata bertujuan menjadikan desa sebagai destinasi pariwisata dengan cara mengintegrasikan keindahan alam dan kekayaan budaya, serta menyediakan fasilitas umum dan aksesibilitas yang memadai, sambil tetap mempertahankan tata cara dan tradisi masyarakat desa. Prinsip utama dari desa wisata adalah fokus pada konsep "desa membangun," yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk membangun desa mereka secara mandiri.

Pengembangan desa wisata ini merupakan bagian dari misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan usaha produktif di sektor pariwisata (Disbudparpora Ponorogo,2018).

Menurut Nuryati, konsep desa wisata mencakup elemen atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang terintegrasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Desa wisata diwujudkan melalui penyelarasan dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dalam komponen desa wisata, terdapat dua konsep utama:

1. Akomodasi merujuk pada bagian dari tempat tinggal masyarakat lokal atau unit-unit yang didesain mengikuti konsep hunian tradisional penduduk setempat.
2. Atraksi merujuk pada semua aspek kehidupan sehari-hari penduduk lokal dan lingkungan fisik desa yang memungkinkan wisatawan terlibat secara aktif sebagai bagian dari pengalaman mereka (dalam Zebua: 2012).

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran. Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan

hidupnya (Linton, 1956). Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat (Marlin. 2014).

Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat (Soekanto, 2014). Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang pria bila berjalan dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar.

Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami fungsi dan peran masing-masing individu dalam lingkungan di dalamnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktivitas yang dilakukannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok.

Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeran dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut (Horton dan Hunt, 1987).

Budaya masyarakat merupakan suatu sistem yang menyatu dan tercermin melalui norma-norma sosial yang mengarahkan perilaku individu dalam menjalankan perannya. Ini menunjukkan bahwa suatu peran sering kali dipahami dalam hubungannya dengan peran lainnya, meskipun belum tentu menciptakan interaksi langsung. Contohnya, peran guru dan peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari dijalankan secara normatif, yang berarti bahwa ada perilaku tertentu yang dianggap pantas dan diharapkan dari seorang guru, orang tua, atau bahkan lembaga secara keseluruhan. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku yang dianggap tepat dan efektif menjadikan peran tidak terpisahkan dari budaya dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran menurut Ralph Linton sangat relevan untuk dimasukkan dalam konteks ini.

Menurut Koentjaraningrat (2009), kepemimpinan dalam masyarakat bukan hanya sebuah posisi sosial, melainkan juga sebuah proses sosial. Untuk menjalankan tugasnya, seorang pemimpin membutuhkan tiga elemen kunci: kekuasaan, kewibawaan, dan popularitas. Adat sebagai bagian dari sistem pengendalian sosial mencakup berbagai aspek seperti cita-cita, norma, keyakinan, sikap, peraturan, hukum, dan elemen-elemen lainnya. Dari penjelasan

tersebut, terlihat bahwa pemangku adat adalah individu yang memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam menjaga serta menjalankan tradisi tertentu di suatu wilayah.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa kedudukan seorang pemimpin adat dalam masyarakat sangatlah signifikan karena ia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kaumnya. Pimpinan adat di Minangkabau adalah individu yang berasal dari dalam komunitasnya, dipilih melalui kesepakatan bersama, dan memiliki tanggung jawab yang melibatkan tidak hanya kaumnya, tetapi juga pihak yang menunjuknya.

Di Minangkabau, konsep Urang Ampek Jinih merupakan elemen fundamental dalam struktur sosial adat, terutama di Nagari Tuo Pariangan. Istilah ini merujuk pada empat kelompok pemimpin adat yang memiliki peran krusial dalam mengelola kehidupan masyarakat di nagari. Kelompok-kelompok ini meliputi Pangulu, Manti, Malin, dan Dubalang, yang masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda dalam menjaga tatanan sosial, menerapkan hukum adat, dan memastikan kesejahteraan komunitas. Keberadaan Urang Ampek Jinih mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan hukum dalam sistem pemerintahan tradisional masyarakat Minangkabau (Marwan, 2016).

1. Pangulu

Pangulu dalam budaya Minangkabau memiliki peran sebagai pengendali, pengarah, dan pengawas yang melindungi serta memimpin anak kemenakan. Mereka menjadi sumber utama aturan dan keputusan yang dibutuhkan oleh

masyarakat yang mereka pimpin. Pangulu dianggap sebagai figur yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar dalam menyokong serta mengawasi kelompok yang dipimpinnya.

2. Malin

Malin dalam tradisi Minangkabau dikenal sebagai *suluah bendang*, yang artinya penerang dalam masyarakat. Mereka berasal dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ilmu agama Islam. Tugas utama malin adalah membimbing, mendidik anak-anak, memberikan arahan kepada masyarakat, memimpin berbagai upacara keagamaan seperti pernikahan, pemakaman, dan ritual lainnya melalui peran di surau atau masjid. Selain itu, mereka juga dikenal dengan sebutan orang malin, tuangku, atau orang syiak.

3. Manti

Manti dalam masyarakat Minangkabau adalah sekelompok individu yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai aspek umum seperti tata kelola pemerintahan dan struktur sosial. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk berbagai kepentingan Masyarakat kolektif. Kelompok ini dihormati dalam struktur sosial karena kontribusi serta kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat. Sebagai hasilnya Manti dianggap sebagai komponen kepemimpinan didalam masyarakat Minangkabau.

4. Dubalang

Dabalang adalah pembantu Pangulu yang khusus menangani aspek keamanan dalam masyarakat. Istilah Dubalang berasal dari hulubalang yang

menggambarkan peran mereka dalam menjaga keamanan baik di dalam komunitas sukunya maupun di lingkungan nagari secara umum. Ketika terjadi kekacauan atau huru hara, Dubalang berada di garis depan untuk menangani dan mengamankan situasi tersebut. Tugas ini sering kali menghadapi tantangan berat, yang tidak hanya mengancam kesehatan fisik mereka tetapi juga keselamatan jiwa mereka. Oleh karena itu, Dubalang dikenal sebagai "*tagak di pintu mati*" menunjukkan betapa penting dan risikonya peran mereka dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat.

Pemangku adat di Minangkabau memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga serta memimpin adat dan budaya komunitas Minangkabau. Mereka adalah tokoh otoritatif yang memegang peran kunci dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal, serta berperan sebagai penghubung dalam pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata membentuk hubungan erat antara komunitas lokal dan industri pariwisata. Mereka menjadi suara representatif komunitas, memastikan bahwa pengembangan pariwisata memperhatikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepentingan lokal. Pemangku adat juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan.

Keterlibatan pemangku adat dalam pengembangan pariwisata membentuk hubungan erat antara komunitas lokal dan industri pariwisata. Mereka menjadi suara representatif komunitas, memastikan bahwa pengembangan pariwisata memperhatikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepentingan lokal. Pemangku adat

jug memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan.

Pengembangan pariwisata di suatu lokasi dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam daerah tersebut. Dampaknya bisa positif jika dilakukan dengan prosedur yang tepat, termasuk perencanaan yang teliti yang mempertimbangkan kondisi lokal. Namun, jika tidak direncanakan dengan baik, pengembangan ini dapat berujung pada kerugian atau dampak negatif bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun wilayah tempat pariwisata tumbuh

G. Metodologi

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih dikarenakan Nagari Pariangan merupakan salah satu nagari yang mendapat julukan sebagai “Desa Terindah” versi *Budget Travel Magazine* pada tahun 2012, dengan hal ini para Pemangku Adat di Nagari Pariangan ikut andil dalam pengembangan wisata yang ada di Pariangan agar lebih dikenal oleh khalayak ramai bahwa Pariangan bukan hanya indah pada alamnya tapi juga pada budaya dan adat istiadatnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian merupakan suatu pendekatan yang melibatkan proses pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Pendekatan ini melibatkan peneliti dalam

menggambarkan gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, serta melakukan studi dalam situasi alami (Creswell,2012).

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) dalam bukunya yang menjelaskan bahwa “Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu pendekatan dalam pemecahan masalah yang melibatkan gambaran atau deskripsi objek penelitian secara apa adanya”.

Dengan menerapkan metode dan jenis penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menggali data dan informasi secara mendalam mengenai objek penelitian yang bersangkutan tentang Peran Pemangku Adat dalam Pengembangan Pariwisata di desa wisata Pariangan.

3. Informan Penelitian

Koentjaraningrat (1994) menjelaskan bahwa dalam penelitian, terdapat dua kelompok informan yang dibedakan: informan kunci dan informan biasa. Informan kunci merupakan individu yang memberikan informasi terkait topik penelitian. Mereka dipilih karena memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan, serta mampu memberikan jawaban yang mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Informan kunci dianggap paham dan berpengetahuan luas tentang perkembangan kegiatan pariwisata dan pengembangan desa wisata Pariangan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan dan sasaran informan dipilih berdasarkan apa yang ingin diteliti. Dengan bantuan teknik ini, tujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan masalah penelitian dapat tercapai. Pemilihan informan didasarkan pada penilaian atau karakteristik yang diperoleh dari materi sesuai tujuan penelitian.

- a. Informan kunci adalah orang yang mengetahui secara detail mengenai permasalahan yang ingin diketahuinya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada peneliti yang ingin menjadi informan kunci yaitu pangulu, malin, manti, dan dubalang.

Tabel 1. Daftar Informan Kunci

No.	Nama	Umur	Posisi/Jabatan
1.	Dt. Andomo	65 th	Ketua LKAAM
2.	Dt. Kayo	41 th	Ketua KAN
3.	Dt. Naro Kuniang	65 th	Paruik Suku Dalimo Panjang
4.	Pakiah Lelo	54 th	Malin
5.	Katik Sampono	43 th	Manti
6.	Sutan Batuah	39 th	Dubalang

Sumber: Data Primer 2024

- b. Informan biasa yaitu informan yang diperoleh dari penelitian sebagai bahan tambahan untuk mengkonfirmasi pengetahuan informan kunci. Dalam hal ini yang biasa menjadi informan adalah POKDARWIS, aparat nagari, dan bundo kanduang.

Tabel 2. Daftar Informan Biasa

No.	Nama	Umur	Posisi/Jabatan
1.	Bapak D	37 th	Ketua POKDARWIS
2.	Ibu D	27 th	Bendahara POKDARWIS
3.	Bapak F	33 th	Kaur Keuangan
4.	Ibu Y	49 th	Bundo Kanduang

Sumber: Data Primer 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara utama, yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Namun, sebelum adanya teknik pengumpulan data perlu adanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan dan akan digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Bagi peneliti yang menggunakan metode kualitatif, instrumen penelitian yang paling utama adalah manusia yaitu peneliti itu sendiri dan orang lain yang membantu penelitian tersebut (Afrizal, 2014: 134). Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti yang secara langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, mendengar, meminta, dan mengambil. Akan tetapi, untuk mengambil data tersebut, peneliti membutuhkan instrumen bantuan yaitu panduan atau pedoman wawancara dan alat perekam (Afrizal, 2014: 134-135).

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti harus mengamati langsung ke lokasi penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperluas wawasan peneliti dan memungkinkan mereka melihat fenomena yang diteliti secara langsung. Selama observasi, peneliti berperan sebagai

partisipan, yang berarti keberadaan mereka diketahui di lapangan, dan mereka mencatat informasi penting yang ditemukan (Creswell, 2002:144).

Penulis menggunakan metode observasi partisipatif dalam penelitian ini, di mana peneliti terlibat langsung dalam mengamati dan menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Peneliti mengamati secara langsung berbagai kegiatan dan dinamika yang berlangsung di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat mengenai peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata di Nagari Pariangan. Dengan mendalami situasi di lapangan, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana pemangku adat terlibat dalam pengambilan keputusan, serta kontribusinya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang mengedepankan kelestarian budaya dan tradisi lokal.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara ini memiliki berbagai arti, dikenal dalam Bahasa Inggris sebagai *in-depth interviews*. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali informasi secara rinci terkait hal-hal yang ingin diketahui guna melengkapi data penelitian. Teknik ini juga digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi, terutama jika ada aspek yang tidak dapat dijawab hanya dengan observasi. Selama proses wawancara, sikap pewawancara sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang diperoleh.

Misalnya, jika pewawancara terkesan sombong atau menyudutkan, informan mungkin enggan memberikan jawaban. Oleh karena itu, pewawancara perlu memperhatikan dan peka terhadap perasaan informan (Afrizal, 2014:138).

Dalam wawancara mendalam yang dilakukan dengan para pemangku adat, seperti ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), ketua LKAAM Kecamatan Pariangan, dan *bundo kanduang* di Nagari Pariangan, penulis dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai peranan mereka dalam pengembangan pariwisata di Nagari Pariangan. Beberapa data yang dapat ditanyakan antara lain: peran pemangku adat dalam pengembangan pariwisata, bentuk pengembangan pariwisata, keberlanjutan pariwisata, peran masyarakat dalam pariwisata, dan dampak sosial dan ekonomi pariwisata. Melalui wawancara mendalam ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peranan pemangku adat dalam mengarahkan dan mengelola pariwisata di Nagari Pariangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan mereka dalam upaya melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Dokumentasi

Tujuan dokumentasi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat penelitian, menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan, dan mengabadikan proses dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mengumpulkan gambar, rekaman, serta wawancara saat melakukan penelitian sebagai bukti dari dokumentasi. (Creswell, 2015:222).

Teknik dokumentasi memungkinkan Anda mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung dengan menggunakan dokumen-dokumen yang menyertai data yang diteliti. Menurut Robert C. Bogdan yang dikutip dalam bagian ini, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

Studi dokumentasi telah dimulai sejak peneliti memilih dan menetapkan tema penelitian ini. Dokumentasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kumpulan berita dan artikel yang dipublikasikan oleh media massa, artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa foto yang dapat digunakan sebagai bukti terjadinya penelitian dan untuk mendukung fenomena-fenomena yang diamati pada pariwisata di Nagari Pariangan.

5. Analisa Data

Menganalisis data melibatkan pengumpulan data untuk memudahkan peneliti menafsirkan hasil penelitian, yang sangat penting untuk penerapan metode ilmiah. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penulisan laporan penelitian oleh peneliti (Afrizal, 2015: 176).

Agar hasil dapat lebih mudah dipahami dan di informasikan dengan jelas Analisis data memerlukan pengumpulan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain untuk lebih memahami hasil dan mengomunikasikannya dengan jelas kepada orang lain. Menurut Afrizal, ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data di lapangan dan tahap

kedua adalah tahap pelaporan. Data yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap informan dikategorikan menggunakan kriteria data yang diidentifikasi di lapangan dan pada saat penyusunan laporan. (Afrizal, 2016: 19).

Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menganalisa data sbb: pada tahap menganalisa data dengan mengadakan penganalisaan secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui proses tindakan dan penulisan juga menganalisa data. Hasil yang diperoleh berupa informasi baik orang tua, anak, maupun dari informan lainnya kemudian ditulis tahap akhir sehingga memiliki validitas ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademi. Milies & Huberman, (1992:1) untuk wawancara dianalisis melalui tiga tahap yaitu:

Reduksi data merupakan langkah awal dalam studi data kualitatif. Dalam situasi ini, perlu memadatkan data yang tersedia menjadi kumpulan pengetahuan yang dapat dikelola yang memenuhi persyaratan studi. Bila menggunakan metode analisis data kualitatif, data harus disajikan setelah tahap reduksi, penyajian data dan menarik kesimpulan.

6. Proses Jalannya Penelitian

Proses penelitian dimulai oleh peneliti setelah seminar proposal yang diadakan di ruang sidang Departemen Antropologi pada 15 Januari 2024. Peneliti terlebih dahulu mengajukan izin untuk melaksanakan penelitian langsung di lapangan. Proses pengurusan surat izin ini dilakukan secara online melalui platform yang disediakan untuk akses surat penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada 8 Maret 2024, peneliti menerima surat izin penelitian yang

diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Surat izin ini diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan nomor B/693/UN16.08.WDI/PT.01.04/2024.

Peneliti tidak lagi memerlukan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Datar, karena saat ini izin penelitian skripsi hanya membutuhkan surat izin atau surat tebusan dari pihak universitas. Surat tersebut kemudian dapat langsung diserahkan kepada informan atau instansi terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Awal penelitian ini dimulai, peneliti ke kantor Wali Nagari Pariangan untuk menyerahkan surat izin penelitian. Peneliti juga berdiskusi dengan salah satu Kaur dan Sekretaris Wali Nagari Pariangan yang ada di kantor pada hari itu sebagai perpanjangan tangan Bapak Wali Nagari, serta peneliti juga melakukan wawancara untuk memenuhi data-data yang dibutuhkan selama penelitian skripsi. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa perangkat kantor wali nagari Pariangan, peneliti disarankan untuk melakukan wawancara dan diskusi dengan ketua KAN Nagari Pariangan dan ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya peneliti melakukan diskusi dan wawancara dengan ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar untuk menemukan berbagai data yang digunakan untuk pemenuhan data skripsi. Setelah bertemu dengan ketua LKAAM Kabupaten Tanah Datar peneliti diminta untuk melanjutkan diskusi dengan ketua KAN Nagari Pariangan yang berada di Lima Kaum. Seiring dengan wawancara

dengan informan kunci peneliti juga melakukan wawancara dengan POKDARWIS, Bundo Kanduang, dan Pemilik Usaha Batik khas Nagari Pariangan.



